



PAPUA TANAH DAMAI

JAYAPURA 99116, Dok VIII Atas, RT06/RW09 Mob.Tel. +62 813 44 89 67 14

Jayapura, 29 Desember 2020

Ref: seruan para imam Papua
Re : sikap Uskup di Papua

Kepada Yth.
Mgr. Petrus C. Mandagi, MSC
Uskup Keuskupan Agung Merauke
Di
M E R A U K E

Dengan hormat,

Harapan kami Bapak Uskup menerima surat tanggapan ini dalam keadaan baik dan sehat. Pertama-tama sebaiknya Bapak Uskup berkenankan kami untuk memperkenalkan diri. Kami, Theo van den Broek, adalah seorang misionaris Fransiskan yang datang ke Papua pada tahun 1975. Kami merasa bangga bahwa selama puluhan tahun kami boleh berkarya di bawah bimbingan Mgr. Herman Munninghoff ofm dan Mgr. Leo Laba Ladjar ofm di Keuskupan Jayapura. Selama periode itu saya berkesempatan luas untuk mengelilingi Papua dan mulai mengenal situasi di Papua sambil menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kami. Pada tahun 2005, karena alasan pribadi melulu, kami diizinkan resmi oleh instansi yang berwenang di Vatikan di Roma, untuk melepaskan status kami sebagai anggota ordo religius dan menjadi anggota umat biasa. Sekarang kami sedang hidup dan berkarya di Jayapura. Walau tidak berkedudukan lagi sebagai tenaga Keuskupan dan sudah menikmati masa hari tua kami tetap berniat untuk mengikuti segala perkembangan di Papua, dan sampai saat ini masih mengambil bagian aktif dalam mencari suatu solusi yang bermartabat buat permasalahan di Papua.

Alasan kami menulis surat ini kepada Bapak Uskup adalah isi artikel mengenai Papua dalam majalah Tempo(<https://majalah.tempo.co/read/nasional/162214/gerakan-pastor-di-papua-yang-tak-direstui-para-uskup>). Membaca artikel ini kami merasa sangat sedih dan prihatin, dan perasaan demikian akhirnya kami ingin bagikan dengan Bapak Uskup.

Kami mengikuti perkembangan di Papua dari dekat, dan lazimnya memberikan suatu 'up-date bulanan' yang tertulis kepada para teman kerja di SKP Papua dan sejumlah orang lainnya – termasuk Bapak Uskup Jayapura dan Bapak Uskup Agats - yang berminat mengikuti perkembangan di Papua. Kami sadar bahwa situasi di Papua selama satu setengah tahun terakhir ini sangat berubah menjadi 'situasi darurat'. Salah satu aspek 'perubahan drastis' adalah peningkatan peranan pihak keamanan di Papua sampai menguasai segala kehidupan harian di Papua dewasa ini. Kehadiran serta pengoperasian para unit keamanan

mengakibatkan bahwa kita sekarang ini berhadapan dengan sejumlah insiden kekerasan yang melanggar segala norma hukum dan kewajaran. Sudah tentu terbukti pula bahwa pemakaian kekerasan oleh pihak manapun juga, baik TPNPB maupun TNI/Polisi, tidak akan membawa suatu solusi di Papua. Maka, seruan untuk menghentikan segala bentuk kekerasan ini dan menarik pasukan non-organik dari Papua sangat masuk di akal dan menjadi keinginan banyak umat yang mengakui martabat setiap orang.

Terutama kejadian-kejadian akhir ini di wilayah Intan Jaya, Nduga dan Puncak, membuat kita sadar bahwa perlu ada tindakan berupa perubahan kebijakan secara radikal. Dalam keadaan ini masyarakat luas di Papua mengharapkan suatu peranan yang substansial oleh Gereja-Gereja, secara khusus oleh pimpinannya serta para pelayannya. Harapan ini didasarkan atas keyakinan bahwa dimana orang dianiaya, ditindas dan martabatnya tidak diakui, Gereja-Gereja, malahan semua instansi keagamaan, diandaikan akan mengambil tempat di baris depan untuk membela nilai-nilai yang begitu dasariah. Gereja Katolik akhir ini kurang menonjol dalam peranan itu, apalagi sejak meninggalnya Mgr. John Saklil Pr. Karena kenyataan demikian akhirnya para pelayan di lapangan, para imam, mulai mengangkat suaranya, dan suara ini sangat dihargai umat yang mengalami penderitaan dewasa ini. Seruan ini betul sejati dan ternyata juga didengar para pihak yang berkuasa di Indonesia ini, dan memang itu maksudnya.

Membaca artikel di Tempo kami heran bahwa ternyata menurut Mgr. Mandagi 'para Uskup di Papua' (benarkah, semua?) tidak merestui gerakan para imam ini. Pernyataan demikian sangat menusuk hati banyak orang, dan membuka pintu lebar bagi para 'pihak yang mendukung pendekatan pengamanan gaya sekarang' untuk mengadudombakan para aktor dalam kalangan Gereja Katolik. Maksud pernyataan ini apa? Sudah tentu para imam adalah dibawah naungan Bapak Uskup, sekaligus rekan kerjanya. Mereka ternyata kurang berdialog dengan para Uskup sebelum mengeluarkan seruannya. Boleh jadi, namun kenapa? Pertanyaan ini sebaiknya menjadi bahan refleksi Bapak Uskup.

Terlepas dari aspek struktur serta otoritas internal, ternyata ada pertimbangan serta alasan yang kuat lainnya bagi para imam untuk mengangkat suaranya sebagai 'gembala umat'. Mereka terdorong karena berita penderitaan umat dan kesadaran bahwa tidak boleh berdiam lagi. *Hari HAM seDunia*, tgl 10 Desember, menjadi saatnya yang tepat. Memang sikap yang diambil sangat kontras dengan sikap Bapak Uskup yang tercermin dalam ungkapan Bapak Uskup kepada Mahfud: "Militer ada untuk keamanan. Negara tanpa militer, omong kosong, toh?". Ungkapan semacam ini sangat simplistis dan sebenarnya sangat meremehkan pengalaman serta penderitaan banyak orang yang berkaitan dengan kehadiran operasi militer di wilayah kediamannya. Apakah pembunuhan terhadap sejumlah warga sipil biasa (di Intan Jaya 12 warga sipil dibunuh sejak Desember 2019) sudah dinilai 'wajar'? Apakah pembunuhan brutal terhadap pendeta Yeremias dan katekis Rufius sudah dinilai 'wajar'? Apakah penginterogasian terhadap dua warga sipil oleh anggota TNI sampai terbunuh, lantas jenazahnya dibakar untuk menghilangkan segala jejaknya, sudah bisa diterima tanpa protes? Apakah penembakan empat anak sekolah di Kabupaten Puncak awal Desember 2020 tidak perlu dinilai sebagai suatu tanda pemerosotan moral yang luar biasa? Apakah kenyataan bahwa ribuan masyarakat biasa memilih mengungsi karena ancaman dari kehadiran militer,

sudah menjadi sesuatu yang tidak perlu dipedulikan? Apakah perlu dinilai tepat bahwa sewaktu masyarakat Papua berprotes atas tindakan rasis oleh sekelompok orang non-Papua justru orang Papua ditangkap dan didakwakan karena ‘makar’? Lebih daripada 80 orang dipenjarakan dengan tuduhan itu tanpa ada investgasi yang memenuhi persyaratan, dan dalam persidangan ternyata tidak dapat dibuktikan bahwa mereka bersalah; apakah ini sesuai dengan ‘negara hukum’ kita? Apakah ‘wajar’ bahwa 4.500 anggota TNI dikerahkan secara khusus di seluruh Papua untuk mendukung aparat polisi supaya masyarakat dapat merayakan Hari Natal? Ini bukan berita hoax! Inilah situasi Papua tahun 2020! Semuanya dinilai ‘wajar’ oleh Bapak Uskup?

Ini hanya beberapa insiden saja yang kami sebutkan. Daftar ini bisa jauh lebih panjang dan semuanya dapat didokumentasi dengan baik. Keadaan yang dicerminkan dalam sejumlah insiden diatas menjadi alasan buat para imam untuk mengangkat suara. Salahnya apa, Bapak Uskup? Mereka, para imam, bereaksi karena mengetahui keadaan, dan tidak bisa merasa tenang lagi, seakan-akan semuanya baik-baik saja adanya. Bagi umat inilah suatu ‘sikap pastoral’, ‘sikap gembala’ yang sangat diharapkan dari Bapak Uskup maupun para imam. Hanya mereka yang tidak (mau) tahu atau kurang memahami keadaan di Papua memang mampu untuk tidak tersentuh dan/atau menolak seruan sedemikian.

Memang ada tradisi dalam Gereja Katolik untuk mengutamakan ‘silent diplomacy’. Namun pendekatan itu patut dilihat dengan cukup kritis, karena sering dapat dipersoalkan sifatnya maupun hasilnya. Persoalan sekitar ‘silent diplomacy’ diuraikan dalam suatu artikel kritis belum lama ini. Dapat membaca: <http://www.idekiri.com/2020/12/menggugat-loyalitas-kita-tanggapan-atas-tulisan-romo-franz-magnis.html>. Sudah tentu lobbying bisa bermanfaat, namun kalau itu menjadi pendekatan tunggal, apalagi kalau kurang dibekali dengan informasi tepat dan sikap kritis, kami merasa bahwa pendekatan itu tidak memadai dan kontra-produktif. Sekali-kali suara kita perlu sangat jelas, terbuka dan menarik perhatian betul. Seruan para imam termasuk dalam bagian kegiatan demikian yang sangat dibutuhkan. Kenapa para Uskup tidak dapat mendukungnya? Seorang teman staf keuskupan dari sejumlah tahun lalu, bilang sama kami setelah membaca artikel di Tempo: “...yaaa kok jadi begini? Umat mendapat pelayanan arahan pastoral macam mana ini?”

Soal pemahaman dan niat untuk menginformasikan diri memang mengambil peranan penting dalam pengambilan sikap. Para pemimpin agama memang sebaiknya dibantu untuk memiliki informasi yang tepat dan yang dapat dipercaya. Baru berdasarkan informasi itu mereka merasa siap untuk mengangkat suara. Sikap demikian dapat dihargai. Hal demikian kami sendiri mengalami secara langsung sewaktu masih mengembangkan fungsi dari *Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP)* dalam setiap keuskupan di Papua. Berdasarkan informasi dari SKP para Uskup, malahan para pemimpin agama bisa bergabung dan bersatu-suara dalam *Forum Komunikasi Para Pemimpin Agama (FKPPA)* pada kurun waktu awal 2000an. SKP menjadi fasilitator penggabungan suara para pemimpin agama di Papua selama itu. Para pastor di paroki pun dibantu untuk lebih mengetahui keadaan sebenarnya di Papua. Memang ada suatu kewajiban para pimpinan agama dan para pastor untuk menginformasikan diri. Untuk itu mereka dapat mengandalkan – malahan mendorong aktif – semua SKP untuk mengutamakan

fungsi itu. Hal demikian makin mendesak juga mengingat bahwa ada kampanye besar-besaran di media sosial nasional maupun internasional dimana berita mengenai Papua yang tidak sesuai kenyataan disebarluaskan secara sangat agresif. Kampanye ini memakai ratusan akun di media sosial yang buatan saja, alias palsu dan ternyata menikmati dukungan anggaran dalam jumlah besar.

Untuk memahami permasalahan di Papua memang tidak mudah, sebagian karena kampanye seperti disinggung diatas, sebagian karena stigmatisasi yang sistematis, dan sebagian karena sangat terbatas aksesnya pada daerah konflik. Juga perlu waktu cukup banyak menghadiri di Papua ini untuk mulai menangkap masalahnya dan memahami betapa dalamnya hati bangsa Papua dilukai karena suaranya, haknya serta martabatnya disangkal. Salah satu masalah sangat pokok dan dasariah adalah seluruh proses pengalihan Papua dari pemerintahan kolonial Belanda menjadi bagian dari tanggungjawab pemerintahan Indonesia. Dalam seluruh periode kolonial sebenarnya 'hak anak sulung' di Papua disangkal oleh para penguasa. Sikap kolonial itu pada dasarnya sangat rasis, karena para penguasa *menganggap diri lebih unggul dan lebih berhak dan layak untuk memerintahkan* daripada bangsa yang lahir dan memiliki tanah itu sendiri. Sikap itu juga mewarnai segala proses pengalihan Papua kedalam Republik Indonesia, yang dibulatkan dengan suatu *Pemungutan Pendapat Rakyat (Pepera)* yang sangat cacat hukum. Penyangkalan suara, hak serta martabat orang Papua selama sejarah ini masih sangat dihayati generasi Papua asli dewasa ini sebagai suatu 'luka besar' yang belum dirawat dan yang akan diwariskan kepada generasi penerus. Memahami dampaknya secara betul adalah hasil bergaul dengan bangsa Papua selama cukup lama, dan tidak dapat dipetik selama kunjungan berkala saja. Pemahaman ini dibutuhkan, baru bisa bicara dengan tepat dan dapat didengar serta dihargai oleh umat yang luas.

Maaf, Bapak Uskup, surat tanggapan ini akhirnya cukup panjang. Ini memang mencerminkan keprihatinan kami. Kami terdorong membagikan keprihatinan ini dengan Bapak Uskup karena sebagai anggota umat katolik, kami merasa turut bertanggungjawab atas peranan gereja katolik di Papua.

Terima kasih atas perhatian Bapak Uskup.

Teriring hormat dan doa,

ttd

Theo van den Broek

Cc:
Para Uskup di Papua
Ketua KWI
Ketua Para Imam Papua
Para Direktur SKP Papua